

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hilal, A. L., Kurniawan, M. D., & Firmansyah, M. A. (2021). Upaya Pemerintahan Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Difabel Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial P-Issn*, 23(01), 63–92.
- Al-Farabi, A. 2005. *Fiqh Siyasah: Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Ghazali, Imam. 1981. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Cairo: Dar al-Maarif.
- Ali, Mohamad. 2007. *The Politics of Islam in Contemporary Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Arzul, H. F., Khaidir, A., & Mubarak, A. (2019). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 135–143.
- Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020. Jakarta: BPS 2020
- Budiman, E. K., & Syailendra, M. R. (2025). Pengaturan Jaminan Pemenuhan Hak Bekerja Terhadap Penyandang Disabilitas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2323–2338.
- Cahyoadi, B., Purnama, D. E., & Zamzami, M. Y. (2022). Pembuatan Key Performance Indicator (KPI) Standar Jaminan Mutu Internal (SJMI) di Lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Tulungagung. *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 20–25.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
- Fauzi, M., & Rahman, R. 2021. "Fiqh Siyasah dalam Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Fiqh Siyasah*, Vol. 7 No. 2.
- Hakim, H. 2017. "Kebijakan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 2.
- Hartati, M. 2022. "Peran Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Kebijakan Sosial: Sebuah Pendekatan Partisipatif." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1.
- Hasanah, S. 2021. "Dampak Kebijakan Insentif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 30 No. 1.

- Ibadiyah, R. (2023). Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. *Journal of Islamic Business Law*, 7(3).
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. AMU Press, 1-182.
- Ismail, R. 2019. "Efektivitas Insentif Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Penyerapan Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 27 No. 1.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasa Syariah & Fiqih Siyasa. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, 5(2).
- Kandiyas, Y. A., Fahamsyah, E., & Efendi, A. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 913-927.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1991. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (QS. An-Nahl: 90).
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mubaroq, F. F. (2024). Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa. *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law*, 1(2), 59-67.
- Mukhtarom, A., & Susilo, P. (2019). Negara Dalam Tinjauan Al-Qur'an. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 1(1).
- Nashiha, A., Alqadri, A. A., & Utami, Y. P. (2025). Inklusivitas di tempat kerja: Upaya memenuhi hak dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 217-226.
- Nasution, Harun. 2016. *Fiqh Siyasa: Teori dan Praktik Politik Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Oktarina, E., Deshaini, L., & Sugianto, B. (2021). Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia. *Lex Librum*, 7(2), 151-162.
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270-283.
- Pratiwi, S. 2020. "Program Keluarga Harapan dan Dampaknya terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 24 No. 3.

- Rizkiah, M., Sari, S. P., Kautsar, D., Jumhana, E., & Bina Bangsa, U. (2025). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 281–287.
- Sahuddin, S. (2016). Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyasah: Studi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Lombok Timur. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(1).
- Santoso, A. 2020 Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kebijakan Insentif: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21 No. 3
- Saragih, E. P., Darwis, R. S., & Raharjo, S. T. (2024). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Program Inklusif Pegawai Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 5(3), 217–233.
- Shihab, Quraish. *Islamic Political Theory: A Global Perspective*. Jakarta: Mizan, 2008. Tanjung, R., & Sari, M. 2021. "Kebijakan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Pelaksanaan dan Evaluasi." *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 19 No. 1.
- Sulaiman, A. 2019. *Prinsip-prinsip Keadilan dalam Siyasah Islam*. Jakarta: Al Kitab. Sulaiman, A. 2020. "Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Program Bantuan Sosial di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 15 No. 2.
- Susanty, A. P. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 1-11.
- Syahfitri, C. N., Ilham, M., Mulyati, D., & Tjenreng, M. Z. B. (2024). Evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(1), 23–38.
- Wahyu, R., & Setiawan, M. 2022. "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Kota Medan." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15 No. 3.
- Widodo, H. 2020. "Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Insentif untuk Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 24 No. 4.
- Yuliana, A., & Rahmawati, S. 2021. "Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 20 No. 4.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3, 200-210.

Undang Undang

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan